

# **ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU ASPEK KEUANGAN (Studi Empiris pada Wilayah Karesidenan Surakarta)**

*Sularmi & Agus Endro Suwarno*  
*Universitas Muhammadiyah Surakarta*

*The objective of this research is to analyze the performance of the regional government in municipality/regency levels in residency of Surakarta on which is accomplished analysis on decentralization of fiscal.*

*The analysis used to find out the regional financial performance are the degree of fiscal decentralization, fiscal need, fiscal capacity, and fiscal measure, so the financial condition of a regency can be found out. The result of the research showed that the performance of regional government in municipality regency levels in Surakarta is still low, the regional indigenous income and the taxes and non-taxes outcome-sharing is lower in proportion than the contribution/subsidy of central government. Therefore, it can be reported, in complying with its fiscal need, the regency/municipality still needs a subsidy from the central government.*

*Based on the analysis and discussion, it can be concluded that the performance of the regional government in regency/municipality in Surakarta in frame of facing the regional autonomy, in the light of the financial aspect, is still low / has not been good.*

**Keywords:** *regional indigenous income, taxes and non-taxes outcome-sharing, contribution of central government, fiscal need*

## PENDAHULUAN

---

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah Kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu sudah sewajarnya PAD dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan, PAD perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Peningkatan cakupan PAD dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah.

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis otonomi fiskal daerah atau otonomi desentralisasi fiskal.

Otonomi desentralisasi fiskal (*local fiscal autonomy*) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta jika dilihat dari analisis desentralisasi fiskal?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2001 sampai dengan 2003, menganalisis derajat otonomi fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta yang ditekankan pada derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya/posisi fiskal.

## TELAAH TEORI

### 1. Kinerja Keuangan Daerah

Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah, khususnya di bidang keuangan dapat digunakan analisis kinerja keuangan daerah. Menurut Sukanto Reksohadiprojo (2001:1550 seperti dikutip Hikmah (1999) untuk melihat kinerja keuangan daerah dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu:

- 1) 
$$\frac{\text{Pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Total penerimaan daerah (TPD)}} \times 100$$
- 2) 
$$\frac{\text{Bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk daerah (BHPBP)}}{\text{Total penerimaan daerah (TPD)}} \times 100$$
- 3) 
$$\frac{\text{Sumbangan Daerah (SD)}}{\text{Total penerimaan daerah (TPD)}} \times 100$$

Apabila jumlah PAD lebih besar dari jumlah subsidi dari pemerintah pusat berarti ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin kecil dan sebaliknya. Apabila jumlah PAD lebih kecil dari jumlah subsidi dari pemerintah pusat berarti ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin besar.

## 2. Kebutuhan Fiskal

Untuk mengetahui kebutuhan fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta, terlebih dahulu dihitung kebutuhan fiskal standar yang diperoleh dari jumlah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dengan formula sebagai berikut:

Rata-rata kebutuhan fiskal standar se Jawa Tengah adalah:

$$\text{Standar Kebutuhan Fiskal (SKF)} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten/kota}}$$

Indeks pelayan publik per kapita pemerintah daerah kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta adalah:

$$\text{Indeks Pelayanan Publik perkapita (IPPP)} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten/kota}}$$

PPP : jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah.

Semakin tinggi indeksnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah pengeluaran atau kebutuhan fiskal daerah dan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan penduduk untuk memenuhinya. Apabila jumlah pengeluaran per kapita suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan standar kebutuhan fiskal, berarti kebutuhan fiskalnya besar. Apabila pemerintah daerah mampu mencukupi sebesar kebutuhan fiskal daerah tersebut berarti pemerintah daerah sudah dianggap mampu.

## 3. Kapasitas Fiskal (*Fiscal capacity*)

Sama halnya dengan perhitungan kebutuhan fiskal di atas untuk standar yang digunakan adalah data PDRB per kapita se Jawa Tengah atas dasar harga berlaku tahun anggaran 2001–2003.

$$\text{Kapasitas Fiskal Standar (KFS)} = \frac{\text{Jumlah PDRB} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten/kota}}$$

Kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Fiscal Capacity (FC)} = \frac{\text{Jumlah PDRB} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar}}$$

PDRB : Produk domestik regional bruto

Semakin tinggi hasilnya maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin tinggi. Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah guna membiayai pembangunan daerah. Dengan penilaian, apabila jumlah PAD yang diserahkan kepada pemerintah daerah lebih besar dari jumlah kebutuhan fiskal daerah tersebut berarti potensi untuk mendapatkan PAD di daerah tersebut cukup bagus tanpa ada subsidi dari pemerintah pusat.

Apabila pendapatan (kapasitas fiskal) lebih besar dari pengeluaran atau kebutuhan fiskal sama dengan surplus, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut sudah mampu membiayai kebutuhan fiskal daerahnya dan apabila pendapatan atau kapasitas fiskal kurang dari pengeluaran atas kebutuhan fiskal, sama dengan defisit, dapat dikatakan daerah tersebut belum mampu membiayai sendiri kebutuhan fiskalnya dan masih harus ditutup subsidi dari pemerintah pusat.

#### 4. Upaya Fiskal/Posisi Fiskal

Posisi fiskal dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB semakin elastis PAD, maka struktur PAD di daerah akan semakin baik maka upaya fiskal dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB harga berlaku} = \frac{\Delta \text{Pendapatan asli daerah (PAD)}}{\Delta \text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)}}$$

Untuk mengetahui tingkat PAD dengan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto dengan kriteria penilaian yaitu apabila PDRB naik satu persen maka akan berpengaruh pada PAD.

## **METODE PENELITIAN**

---

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah studi empiris pada instansi pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta.

### **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah instansi pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta yang meliputi: Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali dan Klaten.

### **3. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2001–2003
- b. Produk Domestik Regional Buto (PDRB) penduduk kabupaten/ kota di Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2001–2003.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengeluaran pembangunan dan belanja rutin se Jawa Tengah tahun anggaran 2001–2003.
- d. PDRB penduduk Jawa Tengah tahun 2001–2003.

### **4. Tehnik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu metode yang bermanfaat dalam membantu memecahkan permasalahan yang aktual dengan berusaha mengumpulkan, menyajikan, menganalisis dan membandingkan data yang ada untuk mengetahui kinerja daerah tingkat kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta dalam menghadapi otonomi daerah, khususnya di bidang keuangan dapat digunakan analisis kinerja keuangan daerah. Untuk melihat kinerja keuangan daerah dilakukan perhitungan: derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal/posisi fiskal dan elastisitas PAD terhadap PDRB.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Kota Surakarta

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya posisi fiskal sebagai berikut:

**Tabel 1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Surakarta Tahun Anggaran 2001–2003 (dalam ribuan rupiah)**

Th.	PAD	%	BHPBP	%	Sumbangan	%	TPD
2001	35.852.034	16,60	17.213.998	7,97	153.396.325	71	216.027.248
2002	45.112.372	16,90	17.695.214	6,63	197.854.427	74,11	266.940.389
2003	50.272.449	14,66	43.026.571	12,55	246.041.000	71,77	342.817.310
Rata-rata	43.745.618,33	19,05	25.978.594,33	9,05	199.097.250,7	72,29	275.261.649

**Tabel 2. Kebutuhan Fiskal Kota Surakarta Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	IPPP	PPP (dalam Rp)	SKF (dalam Rp.)
2001	49,62 x	378.151,99	7.621,65
2002	53,70 x	473.513,30	8.817,29
2003	60,90 x	689.446,65	11.321,29
Rata-rata	54,74 x	513.703,98	9.253,53

**Tabel 3. Kapasitas Fiskal Kota Surakarta Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	Kapasitas Fiskal	PDRB Per Kapita (dalam Rp.)	Standar Kapasitas Fiskal (dalam Rp.)	Kebutuhan Fiskal	Selisih
2001	47,92 x	6.000.371,55	125.209,04	49,62 x	- 1,70
2002	47,35 x	6.667.443,21	141.017,08	53,70 x	- 6,35
2003	54,21 x	8.401.458,37	154.969,81	60,90 x	- 6,69
Rata-rata	49,83 x	7.026.424,38	140.398,64	54,74 x	- 4,91

**Tabel 4. Upaya Fiskal Kota Surakarta Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	Pertumbuhan PAD (dalam Rp.)	%	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku / Rp.)	%
2001	35.852.034.000	-	3.321.685.680.000	-
2002	45.112.372.000	25,83	3.705.510.330.000	11,56
2003	50.272.449.000	11,44	4.177.490.750.000	12,74
Rata-rata	-	18,64	-	12,15

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB} = \frac{18,64}{12,15} = 1,53\%$$

Berdasarkan tabel 1, PAD dan BHPBP tahun anggaran 2001–2003, untuk setiap tahunnya memiliki proporsi atau jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan proporsi atau jumlah sumbangan dari pemerintah pusat. Jika dilihat secara rata-rata selama tahun anggaran proporsi PAD sebesar 16,05%, sedangkan sumbangan dari pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih besar yaitu 72,29%. Hal ini berarti kinerja pemerintah kota Surakarta dapat dikatakan masih rendah, karena proporsi sumbangan lebih besar jika dibandingkan PAD dan BHPBP.

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa kebutuhan fiskal Kota Surakarta selama tiga tahun anggaran 2001–2003 untuk setiap tahunnya lebih besar dari standar kebutuhan fiskalnya. Jika dilihat dari secara rata-rata selama tahun anggaran, kebutuhan fiskal sebesar Rp. 513.703,53 atau 54,74 kali lipat standar kebutuhan fiskal daerah (Rp. 9.253,53). Hal ini berarti kebutuhan fiskal Kota Surakarta besar, baik untuk setiap tahunnya maupun secara rata-rata, karena kebutuhan fiskal daerahnya lebih besar dari standar kebutuhan fiskal se Jawa Tengah.

Berdasarkan tabel 3, kota Surakarta mempunyai kapasitas fiskal yang lebih baik dari standar kebutuhan fiskal. Jika dilihat dari kapasitas fiskal dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya, maka terdapat selisih negatif yaitu tahun 2001 selisih sebesar 1,7 kali, tahun 2002 sebesar 6,35 kali dan tahun 2003 –6,69 kali. Jika diamati selisih tersebut dari tahun ke tahun semakin besar. Hal ini berarti untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya Pemerintah Kota Surakarta masih membutuhkan subsidi dari pemerintah pusat. Dari hasil analisis tersebut kinerja pemerintah Kota Surakarta masih rendah, karena masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya.

Berdasarkan tabel 4, terlihat elastisitas PAD Kota Surakarta selama tahun anggaran 2001–2003 terhadap PDRB atas harga berlaku secara rata-rata sebesar 1,53% yang berarti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan PAD 1,53%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kota Surakarta cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB.

## 2. Kabupaten Sukoharjo

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya posisi fiskal nampak dalam tabel 5:

**Tabel 5. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2001 – 2003 (dalam ribuan rupiah)**

Th.	PAD	%	BHPBP	%	Sumbangan	%	TPD
2001	14.791.345	6,78	16.281.852	7,68	161.550.775	76,22	211.957.613
2002	18.555.318	7,00	14.027.401	5,29	226.094.955	85,29	265.092.756
2003	17.538.252	5,03	26.245.177	7,53	279.318.040	80,15	348.489.996
Rata-rata	16.961.638,33	6,34	18.851.476,67	6,83	222.321.265,70	80,55	275.180.121,70

**Tabel 6. Kebutuhan Fiskal Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	IPPP	PPP (dalam Rp)	SKF (dalam Rp.)
2001	33,90 x	257.397,58	7.621,65
2002	33,87 x	298.643,60	8.817,66
2003	38,06 x	430.867,03	11.321,29
Rata-rata	35,28 x	328.969,40	9.253,53

**Tabel 7. Kapasitas Fiskal Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	Kapasitas Fiskal	PDRB Per Kapita (dalam Rp.)	Standar Kapasitas Fiskal (dalam Rp.)	Kebutuhan Fiskal	Selisih
2001	28,90 x	4.617.924,20	125.209,04	33,90 x	- 5
2002	28,75 x	4.054.613,21	141.017,08	33,87 x	- 5,12
2003	28,71 x	4.449.401,13	154.969,81	38,06 x	- 9,35
Rata-rata	28,79 x	4.040.646,18	140.398,64	35,28 x	- 6,49

**Tabel 8. Upaya Fiskal Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	Pertumbuhan PAD (dalam Rp.)	%	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku / Rp.)	%
2001	14.791.345.000	-	2.878.709.930.000	-
2002	18.555.318.000	25,45	3.253.835.210.000	13,03
2003	17.538.252.000	- 5,48	3.598.724.580.000	10,60
Rata-rata	-	9,99	-	11,82

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB} = \frac{9,99}{11,82} = 0,85\%$$

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui kinerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama tiga tahun anggaran 2001–2003 masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kecilnya proporsi PAD dan BHPBP, jika dibandingkan dengan sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Jumlah subsidi selalu meningkat jika dibandingkan dengan jumlah PAD dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan, meskipun jumlah atau proporsi BHPBP di tahun 2003 meningkat, tetapi peningkatan masih kecil dibandingkan dengan jumlah subsidi.

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa kebutuhan fiskal Kabupaten Sukoharjo besar. Hal ini disebabkan jumlah kebutuhan fiskal tahun 2001–2003 lebih besar dari kebutuhan fiskal daerahnya.

Berdasarkan tabel 7, Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2001–2003 memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal se Jawa Tengah. Jika kapasitas fiskal dibandingkan dengan kebutuhan fiskal terdapat selisih negatif, tahun 2001 selisih –5 kali, tahun 2002 –5,12 kali dan tahun 2003 –9,35 kali. Hal ini berarti kapasitas fiskal Kabupaten Sukoharjo belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fiskal dan masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan tabel 8, terlihat elastisitas PAD Kabupaten Sukoharjo terhadap PDRB atas harga berlaku selama tiga tahun anggaran 2001–2003 secara rata-rata 0,85%. Hal ini berarti setiap kenaikan PDRB sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan PAD sebesar 0,85%.

### 3. Kabupaten Wonogiri

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya posisi fiskal sebagai berikut:

**Tabel 9. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2001– 2003 (dalam ribuan rupiah)**

Th.	PAD	%	BHPBP	%	Sumbangan	%	TPD
2001	14.224.168	5,07	12.174.802	4,34	245.697.047	87,51	280.772.979
2002	23.108.191	7,11	15.846.978	4,88	262.704.270	80,82	325.063.864
2003	27.433.346	6,48	26.927.834	6,36	344.490.800	81,34	344.490.800
Rata-rata	21.588.568,33	6,22	18.316.538	5,19	284.297.372,3	83,22	316.778.881

**Tabel 10. Kebutuhan Fiskal Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	IPPP	PPP (dalam Rp)	SKF (dalam Rp.)
2001	30,21 x	230.231,41	7.621,65
2002	30,82 x	271.769,62	8.817,66
2003	33,62 x	380.575,77	11.321,29
Rata-rata	31,55 x	294.192,27	9.253,53

Tabel 11. Kapasitas Fiskal Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2001 – 2003

Tahun	Kapasitas Fiskal	PDRB Per Kapita (dalam Rp.)	Standar Kapasitas Fiskal (dalam Rp.)	Kebutuhan Fiskal	Selisih
2001	16,04 x	2.008.632,08	125.209,04	30,21 x	- 14,17
2002	16,03 x	2.260.182,22	141.017,08	30,82 x	- 14,79
2003	16,08 x	2.492.240,74	154.969,81	33,62 x	- 17,54
Rata-rata	16,05 x	2.253.685,01	140.390,64	31,55 x	- 15,5

Tabel 12. Upaya Fiskal Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2001 – 2003

Tahun	Pertumbuhan PAD (dalam Rp.)	%	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku / Rp. )	%
2001	14.224.168.000	-	2.245.387.530.000	-
2002	23.108.191.000	3,86	2.500.706.300.000	11,37
2003	27.433.346.000	3,17	2.773.427.800.000	10,91
Rata-rata	-	3,52	-	11,14

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB} = \frac{3,52}{11,14} = 3,63\%$$

Berdasarkan tabel 9, dapat dikatakan selama tahun anggaran 2001–2003 pemerintah Kabupaten Wonogiri kinerjanya masih rendah. Hal ini disebabkan PAD dan BHPBP tahun anggaran 2001–2003 memiliki proporsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat. Hal ini berarti dalam memenuhi pembiayaan kebutuhan daerahnya masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan tabel 10, perkembangan kebutuhan fiskal Kabupaten Wonogiri selama tiga tahun anggaran 2001–2003 mengalami peningkatan, begitu juga dengan standar kebutuhan fiskalnya. Tahun 2001 indeks pelayanan publik per kapita sebesar 20,21 kali dari SKF nya (Rp. 7,621,65) atau sebesar Rp. 230.231,41. Tahun 2002 naik menjadi Rp. 271.769,62 atau 30,82 kali dari SKF nya (Rp. 8.817,66) dan tahun 2003 naik menjadi Rp. 380.575,77 atau 33,62 kali dari SKF nya (Rp. 11.321.129). Atas dasar analisis tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2001–2003 besar, karena jumlah kebutuhan fiskalnya lebih besar dari standar kapasitas fiskal daerahnya.

Kabupaten Wonogiri memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik dibandingkan dengan standar kapasitas fiskal daerahnya (lihat tabel 11). Hal ini terlihat dari tahun ke tahun selama tiga tahun anggaran 2001–2003 kapasitas fiskal Kabupaten Wonogiri lebih besar dari standar

kapasitas fiskal. Jika kapasitas fiskal dibandingkan dengan kebutuhan fiskal, maka terdapat selisih negatif yaitu tahun 2001 -14,17 kali, tahun 2002 sebesar -14,79 kali dan tahun 2003 sebesar -17,54 kali. Hal ini menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Wonogiri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya dan masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat.

Elastisitas PAD Kabupaten Wonogiri terhadap PDRB atas harga berlaku selama tiga tahun anggaran 2001-2003 secara rata-rata sebesar 3,63% (lihat tabel 12). Hal ini berarti, bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan PAD sebesar 3,63% yang berarti berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD atau penerimaan PAD Kabupaten Wonogiri cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB.

#### 4. Kabupaten Karanganyar

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya posisi fiskal sebagai berikut:

**Tabel 13. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 - 2003 (dalam ribuan rupiah)**

Th.	PAD	%	BHPBP	%	Sumbangan	%	TPD
2001	16.550.716	6,53	17.345.565	6,84	213.302.344	84,15	253.490.647
2002	23.188.517	8,01	21.545.995	7,44	229.954.846	79,44	289.482.690
2003	21.898.284	6,62	22.222.865	6,71	286.823.880	86,67	330.945.029
Rata-rata	20.545.839	7,05	20.371.475	7,00	243.360.356,7	83,42	291.306.122

**Tabel 14. Kebutuhan Fiskal Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 - 2003**

Tahun	IPPP	PPP (dalam Rp)	SKF (dalam Rp.)
2001	38,95 x	296.900,55	7.621,65
2002	37,09 x	327.026,49	8.817,66
2003	35,51 x	402.021,16	11.321,29
Rata-rata	37,18 x	341.982,73	9.253,53

**Tabel 15. Kapasitas Fiskal Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 - 2003**

Tahun	Kapasitas Fiskal	PDRB Per Kapita (dalam Rp.)	Standar Kapasitas Fiskal (dalam Rp.)	Kebutuhan Fiskal	Selisih
2001	27,93 x	3.497.670,02	125.209,04	38,95 x	- 11,02
2002	27,51 x	3.879.779,93	141.017,08	37,09 x	- 9,58
2003	27,58 x	4.274.171,37	154.969,81	35,51 x	- 7,93
Rata-rata	27,67 x	3.883.873,77	140.398,64	37,18 x	- 9,51

Tabel 16. Upaya Fiskal Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 – 2003

Tahun	Pertumbuhan PAD (dalam Rp.)	%	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku / Rp.)	%
2001	16.550.716.000	-	2.812.235.120.000	-
2002	23.188.517.000	3,19	3.161.318.400.000	12,41
2003	21.898.284.000	3,32	3.518.510.690.000	11,30
Rata-rata	-	3,26	-	11,86

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB} = \frac{3,26}{11,86} = 1,46\%$$

Berdasarkan tabel 13 dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Karanganyar selama tahun anggaran 2001–2003, yang terbaik adalah tahun 2002, proporsi PAD menjadi 8,01%. Begitu juga dengan proporsi BHPBP naik menjadi 7,44. Proporsi sumbangan atau subsidi turun menjadi 79,44%. Sebaliknya tahun 2003 kinerjanya menurun, dimana proporsi PAD, BHPBP terhadap TPD turun sedangkan proporsi sumbangan meningkat. Jika dilihat secara keseluruhan, kinerja pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan masih rendah, karena nilai rasio PAD dan BHPBP memiliki proporsi yang lebih rendah dibandingkan dengan proporsi sumbangan dari pemerintah pusat.

Kebutuhan fiskal Kabupaten Karanganyar selama tiga tahun anggaran, terbesar pada tahun 2001 sebesar 38,95 kali dan terkecil berada pada tahun 2003 sebesar 35,51 kali (lihat tabel 14). Jika dilihat secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kebutuhan fiskal Kabupaten Karanganyar selama tiga tahun anggaran (2001–2003) besar karena kebutuhan fiskalnya lebih besar dari standar kebutuhan fiskal daerahnya.

Kapasitas fiskal Kabupaten Karanganyar selama tiga tahun anggaran (2001–2003) besar, karena kapasitas fiskal daerah lebih besar dari standar kapasitas fiskalnya (lihat tabel 15). Jika kapasitas fiskal tersebut dibandingkan dengan kebutuhan fiskal daerahnya maka terdapat selisih negatif yaitu tahun 2001 sebesar –11,02 kali lipat, tahun 2002 sebesar –9,58 kali lipat dan pada tahun 2003 sebesar –7,93 kali lipat. Hal ini berarti bahwa dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya, Kabupaten Karanganyar masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan tabel 16 terlihat elastisitas PAD Kabupaten Karanganyar terhadap PDRB atas harga berlaku, secara rata-rata sebesar 1,46%. Hal ini berarti setiap kenaikan PDRB 1%, maka akan mengakibatkan kenaikan PAD sebesar 1,46% yang berarti pengaruh positif terhadap penerimaan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa

penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB.

### 5. Kabupaten Sragen

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya posisi fiskal sebagai berikut:

**Tabel 17. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2001 – 2003 (dalam ribuan rupiah)**

Th.	PAD	%	BHPBP	%	Sumbangan	%	TPD
2001	15.884.596	6,18	9.255.777	3,60	226.993.330	88,29	247.094.268
2002	24.347.952	8,00	11.704.817	3,85	262.724.479	86,37	304.171.996
2003	35.834.964	9,94	20.913.967	5,80	303.832.924	84,26	360.581.855
Rata-rata	25.355.837,33	8,04	13.958.187	3,75	264.516.911	86,31	307.282.706,3

**Tabel 18. Kebutuhan Fiskal Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	IPPP	PPP (dalam Rp)	SKF (dalam Rp.)
2001	38,71 x	295.085,56	7.621,65
2002	36,79 x	324.436,90	8.817,66
2003	37,31 x	422.3691,93	11.321,29
Rata-rata	37,60 x	347.288,46	9.253,53

**Tabel 19. Kapasitas Fiskal Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	Kapasitas Fiskal	PDRB Per Kapita (dalam Rp.)	Standar Kapasitas Fiskal (dalam Rp.)	Kebutuhan Fiskal	Selisih
2001	18,06 x	2.261.411,87	125.209,04	38,71 x	- 20,65
2002	17,53 x	2.471.635,91	141.017,08	36,97 x	- 19,26
2003	17,52 x	2.715.598,91	154.969,81	37,31 x	- 19,79
Rata-rata	17,70 x	3.482.881,95	140.398,64	37,60 x	- 19,9

**Tabel 20. Upaya Fiskal Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2001–2003**

Tahun	Pertumbuhan PAD (dalam Rp.)	%	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku / Rp. )	%
2001	15.884.596.000	-	1.920.935.960.000	-
2002	24.347.952.000	53,28	2.104.802.400.000	9,57
2003	35.834.964.000	47,18	2.318.336.660.000	10,15
Rata-rata	-	50,23	-	9,86

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB} = \frac{50,23}{9,86} = 5,09\%$$

Berdasarkan tabel 17, terlihat bahwa proporsi atau jumlah PAD dan BHPBP terhadap TPD Kabupaten Sragen selama tiga tahun anggaran (2001–2003) mengalami peningkatan. PAD tahun 2001 sebesar Rp.15.884.596 atau 6,18%, kemudian tahun 2002 naik menjadi Rp.24.347.952.000 atau 8% dan pada tahun 2003 naik lagi menjadi Rp.9.255.777.000 atau 9,94%. Rasio BHPBP pada tahun 2001 3,85%, kemudian tahun 2003 naik menjadi Rp.20.913.967.000 atau 5,80%. Sebaliknya proporsi sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Dari semula tahun 2001 sebesar 88,29% (Rp.226.330.000), pada tahun 2002 turun menjadi 86,37% (Rp.262.724.497.000) dan pada tahun 2003 turun lagi menjadi 84,26% (Rp.303.832.924.000). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan selama tiga tahun anggaran, kinerja Kabupaten Sragendari tahun ke tahun semakin menurun, tetapi jika proporsi PAD dan BHPBP mengalami peningkatan dan proporsi sumbangan semakin menurun. Jika proporsi PAD dan BHPBP tersebut dibandingkan dengan proporsi sumbangan, maka terdapat selisih yang sangat jauh atau PAD dan BHPBP memiliki proporsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan subsidi pemerintah pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Kabupaten Sragen masih rendah, karena masih memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan tabel 18, terlihat bahwa rasio kebutuhan fiskal Kabupaten Sragen selama tiga tahun anggaran mengalami perubahan yang fluktuatif. Semula indek pelayanan publik per kapita tahun 2001 sebesar 38,71 kali lipat dari standar kebutuhan fiskal (Rp. 7.621,65) atau sebesar Rp. 295.058,56, pada tahun 2002 turun menjadi 36,76 kali lipat dari Rp. 8.817,66 atau sebesar Rp. 324.436,90 dan pada tahun 2003 naik menjadi 37,31 kali lipat dari Rp. 11.321,29 atau sebesar Rp. 422.369,93. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat bahwa selama tiga tahun anggaran kebutuhan fiskal Kabupaten Sragen lebih besar dari standar kebutuhan fiskal daerahnya. Hal ini berarti bahwa kebutuhan fiskal Kabupaten Sragen besar.

Berdasarkan tabel 19, kapasitas fiskal Kabupaten Sragen dari tahun anggaran 2001–2003 semakin menurun. Kapasitas fiskal tahun 2001 sebesar 18,06 kali lipat dari standar kapasitas fiskalnya (Rp. 125.209,04 atau sebesar Rp. 2.261.411,87, kemudian tahun 2002 turun menjadi 17,53 kali lipat dari (Rp. 141.017,08) atau sebesar Rp. 2.471.635,06 dan tahun 2003 turun menjadi 17,52 kali lipat dari Rp. 154.969,81 atau sebesar Rp. 2.715.598,91. Berdasarkan analisis tersebut terlihat kapasitas fiskal Kabupaten Sragen lebih besar dari standar fiskal daerah. Hal ini berarti Kabupaten Sragen memiliki kapasitas yang lebih

baik dibandingkan dengan standar kapasitas fiskal daerahnya. Jika kapasitas fiskal dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya terdapat selisih negatif, tahun 2001 sebesar -20,65 kali lipat, tahun 2002 sebesar 19,26 kali lipat dan tahun 2003 sebesar -19,79 kali lipat. Hal ini berarti Kabupaten Sragen dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya masih memerlukan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat, karena kapasitas fiskal daerahnya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.

Berdasarkan tabel 20, elastisitas PAD Kabupaten Sragen terhadap PDRB atas harga berlaku selama tiga tahun anggaran (2001-2003) secara rata-rata sebesar 5,09%. Hal ini berarti setiap kenaikan PDRB sebesar 1%, akan mengakibatkan kenaikan PAD sebesar 5,09% yang berarti pengaruh positif terhadap penerimaan PAD Kabupaten Sragen cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB.

## 6. Kabupaten Boyolali

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya posisi fiskal sebagai berikut:

**Tabel 21. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2001-2003 (dalam ribuan rupiah)**

Th.	PAD	%	BHPBP	%	Sumbangan	%	TPD
2001	17.675.167	6,86	16.075.188	6,24	218.995.009	85	257.634.487
2002	24.460.326	7,52	21.408.938	6,58	264.640.756	81,36	325.257.089
2003	25.025.386	6,16	18.785.603	4,62	324.543.750	79,84	406.499.797
Rata-rata	22.386.959,67	6,85	18.756.576,33	5,81	269.393.171,7	82,07	329.797.124,3

**Tabel 22. Kebutuhan Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2001-2003**

Tahun	IPPP	PPP (dalam Rp)	SKF (dalam Rp.)
2001	34,36 x	261.872,66	7.621,65
2002	34,96 x	306.265,19	8.817,66
2003	38,37 x	343.403,33	11.321,29
Rata-rata	35,90 x	334.847,06	9.253,53

**Tabel 23. Kapasitas Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2001-2003**

Tahun	Kapasitas Fiskal	PDRB Per Kapita (dalam Rp.)	Standar Kapasitas Fiskal (dalam Rp.)	Kebutuhan Fiskal	Selisih
2001	25,60 x	3.205.225,21	125.205,04	34,36 x	- 8,76
2002	25,60 x	3.610.551,64	141.017,08	34,96 x	- 9,36
2003	24,86 x	3.852.823,7	154.969,81	38,37 x	- 13,51
Rata-rata	25,35 x	3.556.200,18	140.398,64	35,90 x	- 10,55

Tabel 24. Upaya Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2001–2003

Tahun	Pertumbuhan PAD (dalam Rp.)	%	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku / Rp.)	%
2001	17.675.167.000	-	2.972.852.790.000	-
2002	24.460.326.000	38,39	3.362.795.582.000	13,12
2003	25.025.386.000	2,31	3.605.349.125.000	7,21
Rata-rata	-	20,35	-	10,17

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB} = \frac{20,35}{10,17} = 2\%$$

Berdasarkan tabel 21 terlihat proporsi PAD Kabupaten Boyolali selama tiga tahun anggaran 2001–2003 mengalami perubahan yang semakin meningkat tahun 2001 sebesar Rp. 17.675.167.000 atau 6,86%, tahun 2002 sebesar Rp. 24.460.326.000 atau 7,52% dan tahun 2003 sebesar Rp. 25.025.386.000 atau 6,16%. Rasio BHPBP mengalami perubahan yang fluktuatif yaitu tahun 2001 sebesar Rp. 16.075.188 atau 6,24%, tahun 2002 Rp. 21.408.938.000 atau 6,58% dan tahun 2003 Rp. 18.785.603.000 atau 4,62%. Proporsi sumbangan atau subsidi dari pemerintah mengalami penurunan tahun 2001 sebesar Rp. 218.995.009.000 atau 85%, tahun 2002 sebesar Rp. 264.640.756.000 atau 81,36% dan tahun 2003 sebesar Rp. 324.543.750.000 atau 78,84%. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun semakin menurun sehingga dapat dikatakan kinerja semakin baik. Jika dilihat dari proporsi PAD dan BHPBP terhadap TPD dengan rasio sumbangan atau subsidi pemerintah pusat maka terdapat yang sangat jauh dimana PAD dan BHPBP memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan proporsi subsidi dari pemerintah pusat, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Boyolali masih rendah.

Kebutuhan fiskal Kabupaten Boyolali selama tiga tahun anggaran (2001–2003) semakin meningkat. Demikian juga dengan standar kebutuhan fiskal daerahnya (lihat tabel 22). Kebutuhan fiskal tahun 2001 sebesar Rp. 261.872,66 atau 34,36 kali lipat dari standar kebutuhan fiskal daerah (Rp. 7.621,65), tahun 2002 sebesar Rp. 308.265,19 atau 34,96 kali lipat dari standar kebutuhan fiskal (Rp. 8.817,66) dan tahun 2003 sebesar Rp. 343.403,33 atau 38,37 kali lipat dari standar kebutuhan fiskal (Rp. 11.321,29). Hal ini menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun semakin besar. Jika kebutuhan fiskal dibandingkan standar kebutuhan fiskal daerah, maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan fiskal

Kabupaten Boyolali besar, karena kebutuhan fiskalnya lebih besar dari standar kebutuhan fiskal daerahnya.

Kabupaten Boyolali selama tiga tahun anggaran (2001–2003) memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik jika dibandingkan dengan standar kapasitas fiskal daerahnya (lihat tabel 23). Hal ini terbukti tahun 2001 kapasitas fiskal Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 3.205.225,21 atau 25,60 kali lipat dari standar kapasitas fiskal (Rp. 125.205,04), tahun 2002 kapasitas fiskal sebesar Rp. 3.610.551,64 atau 25,60 kali lipat dari standar kapasitas fiskal dari Rp. 141.017,08 dan tahun 2003 menjadi Rp. 3.852.823,7 atau 24,86 kali lipat dari standar kapasitas fiskal dari Rp. 154.969,81. Apabila kapasitas fiskal Kabupaten Boyolali dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya, maka terdapat selisih negatif. Tahun 2001 sebesar –8,76 kali, tahun 2002 sebesar -9,36 kali dan tahun 2003 sebesar –13,51 kali lipat. Hal ini berarti kapasitas fiskal Kabupaten Boyolali selama tiga tahun anggaran (2001–2003) lebih kecil dari kebutuhan daerahnya, yang berarti Kabupaten Boyolali masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.

Elastisitas PAD Kabupaten Boyolali selama tiga tahun anggaran (2001– 2003) terhadap PDRB atas harga berlaku secara rata-rata sebesar 2% (lihat tabel 24). Hal ini berarti setiap kenaikan PDRB 1%, maka akan mengakibatkan kenaikan PAD sebesar 2% yang berarti penerimaan PAD Kabupaten Boyolali cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB atau pengaruh positif terhadap penerimaan PAD.

## 7. Kabupaten Klaten

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya posisi fiskal sebagai berikut:

**Tabel 25. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Klaten  
Tahun Anggaran 2001–2003 (dalam ribuan rupiah)**

Th.	PAD	%	BHPBP	%	Sumbangan	%	TPD
2001	13.832.059	4,17	10.494.720	3,17	301.902.508	91	331.562.595
2002	17.519.438	4,69	12.714.080	3,41	331.679.050	88,88	331.679.050
2003	22.528.944	4,48	36.886.902	7,34	419.686.136	83,50	419.686.136
Rata-rata	17.960.147	4,45	20.031.900,67	4,64	351.089.231,3	87,79	360.975.927

**Tabel 26. Kebutuhan Fiskal Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2001 – 2003**

Tahun	IPPP	PPP (dalam Rp)	SKF (dalam Rp.)
2001	33,21 x	253.132,30	7.621,65
2002	32,50 x	286.483,30	8.817,66
2003	34,76 x	393.482,01	11.321,29
Rata-rata	33,49 x	311.032,54	9.253,53

Tabel 27. Kapasitas Fiskal Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2001 – 2003

Tahun	Kapasitas Fiskal	PDRB Per Kapita (dalam Rp.)	Standar Kapasitas Fiskal (dalam Rp.)	Kebutuhan Fiskal	Selisih
2001	21,16 x	2.649.378,46	125.205,04	33,21 x	- 12,05
2002	21,70 x	3.060.721,06	141.017,08	32,50 x	- 10,80
2003	21,67 x	3.358.660,50	154.969,81	34,76 x	- 13,09
Rata-rata	21,51 x	3.022.920,00	140.398,64	33,49 x	- 11,98

Tabel 28. Upaya Fiskal Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2001 – 2003

Tahun	Pertumbuhan PAD (dalam Rp.)	%	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku / Rp. )	%
2001	13.832.059.000	-	3.352.245.320.000	-
2002	17.519.438.000	3,46	3.891.798.650.000	16,10
2003	22.528.944.000	4,03	4.290.006.980.000	10,23
Rata-rata	-	3,75	-	13,17

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB} = \frac{3,75}{13,17} = 2,10\%$$

Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Klaten selama tiga tahun anggaran (2001–2003) mengalami perubahan yang fluktuatif (lihat tabel 25). PAD tahun 2001 sebesar Rp. 13.832.059.000 atau 4,17%, tahun 2002 sebesar Rp. 17.519.438.000 atau 4,69%, dan tahun 2003 sebesar Rp. 22.528.944.000 atau 4,48%. Proporsi BHPBP terhadap TPD selama tiga tahun anggaran (2001–2003) mengalami peningkatan. Proporsi sumbangan atau subsidi mengalami penurunan. BHPBP tahun 2001 sebesar Rp. 10.494.720.000 atau 3,17%, tahun 2002 sebesar Rp. 12.714.080.000 atau 3,41% dan tahun 2003 sebesar Rp. 36.886.902.000 atau 7,34%. Untuk sumbangan tahun 2001 sebesar Rp. 301.902.508.000 atau 91%, tahun 2002 sebesar Rp. 331.679.050.000 atau 88,88% dan tahun 2003 sebesar Rp. 419.686.136.000 atau 83,50%. Hal ini menunjukkan kinerja Kabupaten Klaten selama tiga tahun mengalami perkembangan yang semakin baik dimana proporsi BHPBP meningkat dan proporsi sumbangan mengalami penurunan. Apabila rasio PAD dan BHPBP dibandingkan dengan subsidi dari pemerintah pusat, maka dapat dikatakan kinerja Kabupaten Klaten masih rendah, karena selama tiga tahun anggaran tersebut rasio PAD dan BHPBP memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan subsidi dari pemerintah pusat.

Kebutuhan fiskal Kabupaten Klaten selama tiga tahun anggaran (2001–2003) mengalami perubahan yang fluktuatif (lihat tabel 26). Kebutuhan fiskal tahun 2001 sebesar Rp. 286.483,30 atau 33,21 kali lipat standar kebutuhan fiskalnya (Rp. 7.621,65), tahun 2002 sebesar Rp.286.483,30 atau 32,50 kali lipat dari Rp. 8.817,66 dan tahun 2003 sebesar Rp. 393.482,021 atau 34,76 kali lipat dari Rp. 11.321,29. Jika kita amati selama tiga tahun anggaran (2001–2003), kebutuhan fiskal setiap tahunnya lebih besar dari standar kebutuhan fiskal daerahnya, maka dapat dikatakan kebutuhan daerah Kabupaten Klaten besar.

Berdasarkan tabel 27 terlihat kapasitas fiskal Kabupaten Klaten selama tiga tahun anggaran mengalami perkembangan yang baik. Tahun 2001 kasitas fiskal sebesar Rp. 2.649.378,46 atau 21,16 kali lipat dari standar kapasitas fiskalnya (Rp.125.209,04), tahun 2002 sebesar Rp.3.060.721,06 atau 21,70 kali lipat dari Rp. 141.017,08 dan tahun 2003 sebesar Rp. 3.358.660,50 atau 21,67 kali lipat dari Rp.154.969,81. Dari perhitungan tersebut Kabupaten Klaten kapasitas fiskal yang lebih baik dibandingkan standar kapasitas fiskal daerahnya. Jika kapasitas fiskalnya dibandingkan kebutuhan fiskal terdapat selisih negatif. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Klaten dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat, sebab kapasitas fiskal yang dimiliki belum cukup untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.

Elastisitas PAD Kabupaten Klaten sebesar 2,10% (lihat tabel 28). Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1%, maka akan mengakibatkan kenaikan PAD sebesar 2,10%, yang artinya berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD atau penerimaan PAD Kabupaten Klaten cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemandirian pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta masih relatif rendah karena pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah di Karesidenan Surakarta dilihat dari segi keuangannya belum berhasil untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal, dimana rasio PAD dan BHPBP baik secara rata-rata maupun untuk setiap tahunnya selama tiga tahun anggaran (2001–2003) memiliki proporsi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio sumbangan/subsidi pemerintah pusat.

2. Pemerintah daerah di setiap Kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta memiliki kebutuhan fiskal yang besar. Hal ini terbukti besarnya kebutuhan fiskal daerah dibandingkan dengan standar kebutuhan fiskal rata-rata se Jawa Tengah baik untuk setiap tahunnya maupun secara rata-rata selama tiga tahun anggaran (2001-2003).
3. Pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta memiliki kapasitas fiskal yang relatif lebih baik dibandingkan dengan standar kapasitas fiskal rata-rata se Jawa Tengah. Tetapi jika dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya maka terdapat selisih kurang. Berdasarkan analisis dapat dikatakan bahwa selisih tersebut merupakan defisit karena kapasitas fiskal lebih kecil dari kebutuhan fiskal. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta belum mampu memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya karena masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
4. Posisi/upaya fiskal dari pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta yang dihitung dengan rata-rata perubahan PAD terhadap rata-rata perubahan PDRB selama tiga tahun anggaran menunjukkan hasil lebih dari 1% kecuali kabupaten Sukoharjo, artinya bahwa laju pertumbuhan PDRB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

## SARAN-SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka perlu disampaikan saran yang mungkin bermanfaat, untuk mencapai suatu kemandirian daerah. Pemerintah daerah diseluruh kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan atas bantuan sumber dana ekstern. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerahnya secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Secara ekstensifikasi pemerintah kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta perlu mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari.
2. Secara intensifikasi yaitu dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak antara lain:
  - a. Pendataan kembali wajib pajak dan obyek pajak yang sudah ada dalam rangka penggalan potensi daerah.

- b. Melakukan perhitungan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, sehingga biaya pemungutan dapat dan perhitungan sebelumnya.
- c. Meningkatnya kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan sehingga kebocoran dapat dikurangi.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anita Wulandari.2001. Akuntansi Kemampuan Keuangan Daerah:Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanakan Otonomi Daerah. *JKAP MAP-UGM. Vol.5. November*.
- Badan Pusat Statistik, 2003. Boyolali dalam Angka. Boyolali: BPS.
- \_\_\_\_\_, 2003. Karanganyar dalam Angka. Karanganyar: BPS.
- \_\_\_\_\_, 2003. Klaten dalam Angka. Klaten: BPS.
- \_\_\_\_\_, 2003. Sragen dalam Angka. Sragen: BPS.
- \_\_\_\_\_, 2003. Sukoharjo dalam Angka. Sukoharjo: BPS.
- \_\_\_\_\_, 2003. Surakarta dalam Angka. Surakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_, 2003. Wonogiri dalam Angka. Wonogiri: BPS.
- \_\_\_\_\_, 2003. Jawa Tengah dalam Angka. Semarang: BPS.
- \_\_\_\_\_, 2004. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2001-2003. Jakarta: CV.Rioma.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2001-2003*. BPS. Jakarta: CV.Petratama Persada.
- Indra Bastian. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: PPA FE-UGM
- M. Soeparmoko. 2003. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan*. Yogyakarta: Andi.
- Mubyarto.2001. *Propek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: BPF E UGM.
- Mugiyatno. 2001. Dampak Pelaksanakan UU No. 18 Tahun 1997 terhadap Kinerja Keuangan Daerah:Studi Kasus di Kabupaten Pemalang. *JKAP MAP-UGM Vol. 5 Mei*.

- Nanik Wahyuni. 2001. Kemandirian dan Otonomi Keuangan Daerah *Jurnal Ekonomi FE-UMM No. 7 November*.
- Sukanto Reksohadiporojo. 2001. *Ekonomika Publik*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Triyono. 2002. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE-UMS Vol. 1 September*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. 2005. Jakarta: CV.Eko Jaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*. 2005. Jakarta: CV.Eko Jaya.
- Yuliati. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Kabupaten Malang-Jawa Timur.